

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
INTISARI	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Keaslian Penelitian	9
D. Tujuan Penelitian	13
E. Manfaat Penelitian	14
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Pejabat Pemerintahan dalam Penyelenggaraan Negara	16
1. Pengertian Pejabat Pemerintahan	16
2. Kewenangan Pejabat Pemerintahan	21
B. Keputusan sebagai Instrumen Pemerintahan	23

1. Pengertian Keputusan	23
2. Diskresi (<i>freis Ermessen</i>) dalam Membuat Keputusan	26
C. Kajian Yuridis mengenai Pidana	30
1. Pengertian Pidana	30
2. Perbuatan Pidana	36
3. Pertanggungjawaban Pidana	40
D. Identifikasi Tindak Pidana Korupsi	44
1. Pengertian Korupsi	44
2. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi	46
3. Jenis dan Tipologi Korupsi	49
4. Tindak Pidana Korupsi Merugikan Keuangan Negara	55
E. Bentuk Putusan dalam Perkara Pidana dan Upaya Hukum	65
1. Putusan Hakim dalam Perkara Pidana	66
2. Upaya Hukum Biasa	70
3. Upaya Hukum Luar Biasa	74
BAB III. METODE PENELITIAN	78
A. Jenis Penelitian	78
B. Sifat Penelitian	79
C. Jenis Data	81
D. Subjek Penelitian	85
E. Lokasi Penelitian	86

F. Alat Pengumpul Data	86
G. Teknik Pengumpulan Data.....	87
H. Analisis Hasil Penelitian	87
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	91
A. Parameter dalam Menentukan Keputusan Pejabat Pemerintahan	
Berindikasi Korupsi	91
B. Analisis Pertimbangan Hakim terkait Pejabat Pemerintahan yang	
Didakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi atas dasar Keputusan yang	
Dibuat oleh Terdakwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2862	
K/Pid.Sus/2015 Atas Nama Terdakwa IMSS	141
1. Kasus Posisi.....	141
2. Dakwaan	146
3. Tuntutan.....	147
4. Putusan Pengadilan.....	149
5. Analisis Pertimbangan Hakim.....	151
BAB V. PENUTUP.....	178
A. Kesimpulan	178
B. Saran.....	180
DAFTAR PUSTAKA	183